

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Sejarah munculnya perilaku korupsi dapat dikaji sejak kehidupan manusia dalam bermasyarakat mulai berkembang, yaitu ketika lahir organisasi kemasyarakatan yang rumit, khususnya pada kerumitan birokrasi pemerintahan dan swasta yang membuka peluang terjadinya korupsi, kolusi, nepotisme. Manusia tampak mulai direpotkan oleh kerumitan perkembangan kehidupan sosial dan pemenuhan kebutuhannya, sehingga timbulnya perilaku korupsi dengan intensitas yang berbeda-beda pada waktu dan tempat yang berlainan, semakin menambah problema manusia yang harus diselesaikan oleh hukum. Seperti halnya dengan semua gejala yang serba rumit, maka perilaku korupsi oleh penyelenggara negara, pegawai negeri, dan kalangan swasta yang juga rumit, tentu saja tidak mudah dirumuskan hanya dalam satu kalimat. Perkembangan perekonomian dunia yang semakin pesat memasuki pasar bebas, setidaknya membawa pengaruh dalam kehidupan masyarakat. Sejak Tahun 1997, keruntuhan perekonomian Indonesia dibawah pemerintahan orde baru sudah mulai kelihatan kemudian dipicu oleh menurunnya nilai rupiah terhadap nilai dolar Amerika Serikat. Rakyat pun menerima akibatnya dan para pengamat hukum menilai, bahwa salah satu penyebab krisis ekonomi karena

banyaknya perilaku KKN yang terjadi di instansi pemerintah dan swasta. Pada sisi lain penegakan hukum tidak dilaksanakan sebagaimana semestinya yang membuat perilaku korupsi semakin menjadi-jadi.<sup>1</sup>

Era reformasi yang sedang berjalan di Indonesia di warisi oleh banyak sekali persoalan yang terjadi di era sebelumnya. Salah satu persoalan yang paling membutuhkan perhatian serius adalah persoalan dibidang hukum, terutama hukum pidana korupsi. Hal ini disebabkan karena dibidang ini persoalan yang ada terus menumpuk. Kasus-kasus korupsi era sebelumnya yang masih belum terselesaikan ditambah oleh banyak kasus korupsi yang justru terjadi di era reformasi ini. Korupsi merupakan masalah multidimensi yang tidak saja berkaitan dengan masalah hukum tetapi juga berkaitan dengan masalah sosial, budaya dan ekonomi.<sup>2</sup>

Tindak Pidana Korupsi merupakan salah satu bagian dari hukum pidana khusus disamping mempunyai spesifikasi ketentuan yang berbeda dengan hukum pidana umum, seperti adanya penyimpangan hukum acara serta apabila ditinjau dari materi yang diatur. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi secara langsung telah melakukan penyimpangan terhadap keuangan dan perekonomian negara dengan diantisipasi sedini dan seminimal mungkin penyimpangan tersebut, diharapkan roda perekonomian dan pembangunan dapat dilaksanakan

---

<sup>1</sup> Prof.Dr.Marwan Mas,SH.MH,*Pemberantasan tindak pidana korupsi*,Penerbit Ghalia Indonesia,2014,hlm 2

<sup>2</sup> Prof.Dr.H.Andi Hamzah,S.H, dkk. *Pengkajian Masalah Hukum Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi*,PT. Gramedia, Jakarta,1984,hlm 1

sebagaimana mestinya sehingga lambat laun akan membawa dampak adanya peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya.<sup>3</sup>

Pembangunan Nasional bertujuan mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, sejahtera, dan tertib berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera tersebut, perlu secara terus-menerus ditingkatkan usaha-usaha pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pada umumnya serta tindak pidana pada khususnya. Ditengah upaya pembangunan nasional di berbagai bidang, aspirasi masyarakat untuk memberantas korupsi dan bentuk penyimpangan lainnya semakin meningkat, karena dalam kenyataan adanya perbuatan korupsi telah menimbulkan kerugian negara yang sangat besar yang pada gilirannya dapat berdampak pada krisis diberbagai bidang. Untuk itu, upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi perlu semakin ditingkatkan dan diintensifkan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kepentingan masyarakat.

Korupsi akhir-akhir ini semakin ramai diperbincangkan, baik di media cetak, elektronik maupun dalam seminar-seminar, lokakarya, diskusi, dan sebagainya. Korupsi telah menjadi masalah serius bagi bangsa Indonesia, karena telah merambah ke seluruh lini kehidupan masyarakat yang dilakukan secara sistematis, sehingga memunculkan stigma negatif bagi negara dan bangsa

---

<sup>3</sup> Dr. Lilik Mulyadi,SH.,MH,*Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*,Penertbit PT.ALUMNI,Bandung,2015,hlm 2

Indonesia di dalam pergaulan masyarakat internasional.

Berbagai cara telah ditempuh untuk pemberantasan korupsi bersama dengan semakin canggihnya modus operandi tindak pidana korupsi. Tentang pemberantasan tindak pidana korupsi banyak menemui kegagalan. Kegagalan tersebut antara lain disebabkan berbagai institusi yang dibentuk untuk pemberantasan korupsi tidak menjalankan fungsinya dengan efektif serta perangkat hukum yang lemah ditambah aparat hukum yang tidak sungguh-sungguh menyadari akibat serius dari tindakan korupsi.<sup>4</sup>

Untuk manfaat keseimbangan, keserasian dan keselarasan dalam kehidupan maka negara Indonesia telah menandatangani ketentuan baru dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi (*United Nations Convention Against Corruption*) tahun 2003 yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption* tahun 2003 dan Konvensi PBB Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang terorganisir (*United Nations Convention Against Transnational Organized Crime*) yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang pengesahan *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* mengenai *Justice Collaborator*.

Korupsi dalam sudut pandang hukum pidana memiliki sifat dan karakter

---

<sup>4</sup> Chaerudin,SH.,MH.dkk, Strategi Pencegahan dan Penegakan hukum Tindak Pidana Korupsi, Penerbit PT.Refika Aditama, Bandung,hlm 1

sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). Paling tidak ada empat sifat dan karakteristik kejahatan korupsi sebagai *extra ordinary crime*. Pertama, korupsi merupakan kejahatan terorganisasi yang dilakukan secara sistematis. Kedua, korupsi biasanya dilakukan dengan modus operandi yang sulit sehingga sangat sulit untuk membuktikannya. Ketiga, korupsi selalu berkaitan dengan kekuasaan. Keempat, korupsi adalah kejahatan yang berkaitan dengan nasib orang banyak karena keuangan negara sangat memberi manfaat untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi yang dilakukan secara konvensional selama ini terbukti tidak efektif dan mengalami berbagai hambatan. Hal ini dikarenakan tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa.<sup>5</sup>

Begitupun dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut cara-cara yang luar biasa. *Justice Collaborator* merupakan salah satu bentuk upaya luar biasa yang dapat digunakan untuk memberantas tindak pidana korupsi yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat termasuk juga pelaku. Pelaku itu bersedia bekerjasama dengan aparat penegak hukum. Peranan saksi sebagai *Justice Collaborator* sangat penting dan diperlukan dalam rangka proses pemberantasan tindak pidana korupsi, karena *Justice Collaborator* itu sendiri tidak lain adalah orang di dalam instansi tersebut, yang diduga telah terjadi praktik korupsi dan bahkan terlibat di

---

<sup>5</sup> Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, penerbit sinar grafika, Jakarta 2007, hlm.1

dalamnya. Istilah *Justice Collaborator* menjadi populer dan banyak disebut oleh berbagai kalangan dalam beberapa tahun terakhir, sampai saat ini belum ditemukan padanan yang pas dalam bahasa Indonesia untuk istilah tersebut. Ada pakar yang memadankan istilah *Justice Collaborator* sebagai saksi pelaku yang berkerjasama. Pada perkembangannya Mahkamah Agung melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2011 memberikan terjemahan *Justice Collaborator* sebagai saksi pelaku tindak pidana tertentu yang mengetahui dan bekerja sama dengan aparat penegak hukum.<sup>6</sup>

Ide lahirnya *Justice Collaborator* berasal dari spirit untuk membongkar kasus yang lebih besar, mengingat korupsi merupakan kejahatan terorganisasi yang melibatkan beberapa orang dalam satu lingkaran koordinasi untuk mencapai tujuan yang sama. Terkadang, para pelaku juga membentuk kerja sama yang kolusif dengan aparat penegak hukum serta membentuk jejaring komplotan koruptor yang solid. Berada dalam kelompok ini menimbulkan apa yang disebut dalam dunia psikologi sebagai '*Paranoid Solidarity*', yaitu perasaan takut akan dikucilkan, dibenci, dan dijerumuskan dalam kelompok, sehingga mau tidak mau para pelaku akan saling melindungi satu sama lain. Terlebih lagi, tindak pidana korupsi merupakan kelompok kejahatan kerah putih, yaitu kejahatan yang biasa dilakukan oleh orang-orang yang memiliki jabatan dan kedudukan penting dalam institusi negara. Hal ini

---

<sup>6</sup> River Yohanes Manalu, 2015, "Justice Collaborator dalam Tindak Pidana Korupsi", Jurnal Lex Lex Crimen; Vol 4, No 1 (2015). <http://e-journal.hukum.sam-ratulangi.ac.id>, diakses 13-02-2015

menunjukkan bahwa korupsi biasa dilakukan oleh orang-orang yang cerdas, orang-orang yang mengerti seluk-beluk keuangan dan birokrasi dalam institusinya. Untuk menutupi perilakunya, para pelaku cenderung akan membuat sebuah skenario yang rapi dan sulit diidentifikasi oleh penyidik dan kejaksaan sehingga mempersulit proses pemeriksaan di persidangan. Sebagai contoh, kasus dugaan korupsi yang dilakukan oleh Angelina Sondakh dan Nazaruddin yang juga menyeret nama Anas Urbaningrum. Dalam aksinya, mereka menggunakan istilah dan kode yang sulit dimengerti oleh orang awam seperti ‘Apel Washington’ dan ‘Apel Malang’.<sup>7</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Pasal 10 Ayat (2) dikatakan bahwa dalam hal terdapat tuntutan hukum terhadap Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau pelapor atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikan, tuntutan hukum tersebut wajib ditunda hingga kasus yang ia laporkan atau yang ia berikan kesaksian telah diputus oleh pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap, dalam Undang-Undang tersebut terlihat bahwa keberadaan *Justice Collaborator* tidak ada tempat untuk mendapatkan perlindungan secara hukum, artinya tidak adanya suatu kepastian hukum yang jelas bagi seorang *Justice Collaborator*. Bahkan, seorang saksi yang juga tersangka atau *Justice*

---

<sup>7</sup> <http://kajiankeilmuan.wordpress.com/2012/27/penerapan> justice collaborator dalam tindak pidana korupsi, Justitia Avila Veda, diakses tanggal 27 oktober 2012

*Collaborator* dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan, akan tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan oleh hakim dalam meringankan pidana yang dijatuhkan. Program perlindungan bagi *Justice Collaborator* yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban belum memadai sebagai landasan atau pijakan hukum bagi aparat hukum untuk memberikan perlindungan hukum. Demikian pula kejahatan yang termasuk *Scandal Crime* ataupun *Serious Crime* seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi belum tegas mengatur kedudukan *Justice Collaborator*. Maka Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu yang terbit tanggal 10 Agustus 2011. Berdasarkan latar belakang ini penulis tertarik untuk meneliti dan mengangkat judul “PENERAPAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG (SEMA) NOMOR 4 TAHUN 2011 DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka dapat



dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

- 1) Bagaimanakah penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 dalam tindak pidana korupsi?
- 2) Hambatan apa yang timbul dalam penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2011 dalam tindak pidana korupsi?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui tentang Penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2011 dalam tindak pidana korupsi.
2. Untuk mengetahui tentang hambatan yang timbul dalam Penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2011 dalam tindak pidana korupsi

### **D. Manfaat Penelitian**

#### **1. Manfaat Teoritis**

Agar penelitian ini dapat menjadi acuan dalam perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan khususnya kepada Instansi Negara (Pemerintah) dan aparat penegak hukum.

#### **2. Manfaat Praktis**

- a) Hasil penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pedoman bagi pihak Instansi Pemerintahan, supaya

dapat menggunakan kewenangannya dengan baik dan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.

- b) Bagi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, agar hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi dan pembendaharaan perpustakaan yang diharapkan berguna bagi mahasiswa dan mereka yang ingin mengetahui dan meneliti lebih lanjut tentang masalah ini.
- 3. Bagi peneliti sendiri, hasil penelitian hukum ini sebagai syarat mendapatkan gelar Strata 1 dibidang hukum.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Dengan ini penulis menyatakan bahwa penelitian hukum Penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice collaborator*) di dalam Tindak Pidana Tertentu yang meringankan saksi pelaku (*Justice Collaborator*) merupakan hasil karya penulis dan bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Adapun terdapat beberapa penulisan hukum lainnya berkaitan dengan penulisan hukum ini, Berikut ini penulis memaparkan 2 (dua) macam skripsi yang mempunyai relevansi yang hampir sama atau

terkait dengan penulisan ini, antara lain :

## 1. Penelitian pertama

a. Judul Penelitian : Urgensi *Justice Collaborator* dalam Pengungkapan KasusTindak Pidana Korupsi. (Tinjauan Yuridis Putusan Nomor: 59/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst)

b. Identitas Penelitian :

NPM : E1A010222

Nama Mahasiswa : Ginia Tia Sagita

Program Studi : Ilmu Hukum

Universitas : Jenderal Soedirman Purwokerto

c. Rumusan Masalah :

1. Apa urgensi *Justice Collaborator* dalam pengungkapan kasus tindak pidana korupsi yang berkaitan denganputusan hakim dalam Putusan No.59/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus seorang terdakwa yang sekaligus merupakan *Justice Collaborator* dalam Putusan No.59/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst?

d. Tujuan Penelitian :

1. Untuk mengetahui urgensi *Justice Collaborator* dalam pengungkapan kasus tindak pidana korupsi di Indonesia.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus seorang

terdakwa yang sekaligus merupakan *Justice Collaborator*.

e. Kesimpulan :

1. Urgensi *Justice Collaborator* dalam pengungkapan kasus tindak pidana korupsi dalam Putusan No. 59/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst yaitu :

- a). Membantu aparat penegak hukum dalam menemukan alat-alat bukti dan tersangka lain yang signifikan sehingga penyidikan dan pemeriksaan dapat berjalan efektif.
- b). Posisi *Justice Collaborator* sangat relevan bagi sistem peradilan pidana Indonesia untuk mengatasi kemacetan prosedural dalam pengungkapan suatu kejahatan terorganisir dan sulit pembuktiannya.
- c). Memudahkan pembuktian dan penuntutan serta dapat mengungkap tuntas suatu tindak pidana terutama yang berkaitan dengan organisasi kejahatan. Majelis Hakim memberikan vonis putusan yang terlalu tinggi untuk terdakwa dan juga tidak mempertimbangkan Kosasih sebagai *Justice Collaborator* dalam hal-hal yang meringankan bagi terdakwa II dalam Putusan No. 59/Pid.B/TPK/2012/PN. Jkt.Pst. Majelis Hakim hanya menuliskan bahwa terdakwa II bersikap kooperatif, padahal posisi *Justice Collaborator*

mempunyai makna lebih dari sekedar bersikap kooperatif, melainkan sebagai seseorang yang berperan dalam mengungkap kasus tindak pidana korupsi.

Penulisan skripsi ini dengan tulisan saya sama-sama mempunyai titik fokus pada keterlibatan saksi pelaku (*Justice Collaborator*). Namun yang membedakan penulisan skripsi ini lebih memokuskan pada urgensi *Justice Collaborator* dalam pengungkapan kasus tindak pidana korupsi, sedangkan penulis dalam penelitian ini lebih difokuskan pada penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 tahun 2011 yang meringankan saksi pelaku (*Justice Collaborator*) dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

## **2. Penelitian kedua**

a. Judul penelitian : Konsep dan Perlindungan Mengenai *Justice Collaborator* dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.

### **b. Identitas Penulis**

NPM : 0806342661

Nama : Maria Yudithia Bayu Hapsari

Program Studi : Ilmu Hukum

Universitas : Indonesia

### **c. Perumusan Masalah**

1. Bagaimanakah pengertian dan konsep *Justice Collaborator* dalam sistem peradilan pidana?
2. Bagaimana ketentuan mengenai perlindungan bagi *Justice Collaborator* dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dan perbandingannya dengan negara lain?
3. Apakah Agus Condro dapat dinyatakan sebagai seorang *Justice Collaborator* dalam pengungkapan kasus tindak pidana korupsi pada pemilihan Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia tahun 2004 dan bagaimana penerapan ketentuan mengenai perlindungan bagi *Justice Collaborator* dalam kasus tersebut?

d. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengertian dan konsep *Justice Collaborator* dalam sistem peradilan pidana.
2. Untuk mengetahui ketentuan mengenai perlindungan bagi *Justice Collaborator* dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dan perbandingannya dengan negara lain.
3. Untuk mengidentifikasi adanya *Justice Collaborator* dalam pengungkapan kasus tindak pidana korupsi pada Pemilihan Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia Tahun 2004 dan mengetahui penerapan ketentuan mengenai perlindungan

bagi *Justice Collaborator* dalam kasus tersebut?

e. Hasil Penelitian

Kedudukan Agus Condro Prayitno sebagai *Justice Collaborator* dalam kasus tindak pidana korupsi pada pemilihan Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia tahun 2004 dibahas sebagai bahan analisis. Dari hasil analisis diperoleh kesimpulan bahwa Agus Condro memiliki peran yang signifikan dalam mengungkap kasus tindak pidana korupsi. Oleh karena itu pada dasarnya ia dapat diberikan perlindungan dan penghargaan, seperti keringanan hukuman, belum ada peraturan yang mengenai perlindungan dan penghargaan bagi *Justice Collaborator*.

## F. Batasan Konsep

### 1. Saksi Pelaku

Menurut Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 tahun 2011 tentang pemberlakuan bagi *Whistel Blower* dan *Justice Collaborator* dalam tindak pidana tertentu adalah seorang pelaku tindak pidana tertentu, tetapi bukan pelaku utama, yang mengakui perbuatannya dan bersedia menjadi saksi dalam proses peradilan.

Menurut Peraturan Bersama Saksi Pelaku yang Bekerjasama adalah saksi yang juga sebagai pelaku suatu tindak pidana yang bersedia

membantu aparat penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana atau akan terjadinya suatu tindak pidana untuk mengembalikan aset-aset atau hasil suatu tindak pidana kepada negara dengan memberikan informasi kepada aparat penegak hukum serta memberikan kesaksian di dalam proses peradilan.<sup>8</sup>

## 2. Tindak Pidana Korupsi

Kata korupsi berasal dari bahasa Latin yaitu *coruptio* atau *corruptus*, kemudian dari turun ke bahasa di negara-negara Eropah seperti Inggris ; *corruption*, Perancis ; *corruption*, Belanda ; *corruptie* yang kemudian dari bahasa Belanda tersebut diserap ke dalam bahasa Indonesia yaitu Korupsi.<sup>9</sup>

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan korupsi sebagai penyelewengan atau penyalahgunaan uang Negara (perusahaan dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain.<sup>10</sup> Dalam Kamus Hukum menuturkan bahwa perkataan korupsi berarti busuk; rusak; busuk; suka menerima uang sogok; menyelewengkan uang/barang milik perusahaan atau negara; menerima uang dengan menggunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi. Korupsi dalam kamus tersebut diartikan penyelewengan

---

<sup>8</sup> Irwan Adi Cahyadi, Kedudukan SEMA dalam hukum positif di Indonesia, <http://studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/546>, diakses Mei 2014

<sup>9</sup> Andi Hamzah, Pemberantasan Korupsi melalui hukum pidana nasional dan internasional, Jakarta : PT.Raja Grafindo persada, 2005, hlm 4

<sup>10</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Jakarta : Balai Pustaka, 2001, hlm 597. <https://mukhsanrofi.wordpress.com>



uang perusahaan atau sebagai tempat seseorang bekerja untuk keuntungan pribadi atau orang lain.<sup>11</sup>

Dalam Ensiklopedi Indonesia, korupsi yaitu gejala bahwa pejabat badan-badan negara menyalah gunakan terjadinya penyuapan, pemalsuan serta ketidakberesan lainnya. Secara harfiah, pengertian korupsi dapat berupa :

- a. Kejahatan, kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, kejahatan dan ketidakjujuran;
- b. Perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya;
- c. Perbuatan yang kenyataannya menimbulkan keadaan yang bersifat buruk ; perilaku yang jahat dan tercela, atau kejahatan moral ; sesuatu yang dikorupsi, pengaruh-pengaruh yang korupsi.<sup>12</sup>

Menurut Sudarto, istilah korupsi berasal dari perkataan *Corruption*, yang berarti kerusakan. Di samping itu, perkataan korupsi dipakai pula untuk menunjuk keadaan atau perbuatan yang busuk. Korupsi banyak disangkutkan kepada ketidakjujuran seseorang dalam bidang keuangan. Pengertian yuridis dari tindak pidana korupsi adalah tindak pidana yang dirumuskan oleh pembentuk Undang-Undang, yang memberi batas-batas dalam pemidanaan terhadap perbuatan-perbuatan yang diancam pidana dalam Undang-Undang Nomor 31

---

<sup>11</sup> Evi Hartanti, SH. *Tindak Pidana Korupsi Edisi kedua*, Penerbit PT. Sinar Grafika, 2007, hlm 8

<sup>12</sup> Ibid

tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Menurut Barda Nawawi Arief, jika dilihat dari sistematika Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.<sup>13</sup>

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Sehubungan dengan judul penelitian diatas, maka jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif, yang berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan tentang Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2011 terkait dengan peringanan saksi pelaku (*Justice Collaborator*) Dalam Penelitian ini memerlukan lima tugas ilmu hukum,yaitu deskripsi hukum positif, sistematisasi hukum positif, analisis hukum positif, pendapat hukum dan fakta hukum

### **2. Sumber Data**

Data-data yang digunakan penulis dalam penulisan hukum ini adalah data sekunder yang, terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, berupa peraturan perundang-undangan yang tata urutannya sesuai dengan Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yaitu :

1. Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

---

<sup>13</sup> Ibid

2. Undang-undang nomor 5 tahun 2009 tentang pengesahan United Nation Convention Againsts Transnasional Organized Crime (UNTOC)
3. Undang-undang nomor 7 tahun 2006 tentang pengesahan UNCAC (United Nations Convention Againsts Corruption)
4. Undang-undang nomor 13 tahun 2006 juncto Undang- Undang nomor 31 tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
6. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) nomor 4 tahun 2011 tentang perlakuan bagi pelapor tindak pidana (*Whistle Blower*) dan saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*)
7. Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, Kepala Polisi Republik Indonesia ketua KPK dan ketua LPSK tentang perlindungan bagi pelapor, saksi pelaku dan saksi pelaku yang bekerjasama
8. Inpres (Instruksi Presiden) nomor 9 tahun 2011 tentang RAN PK.
- b. Bahan Hukum Sekunder : berupa fakta hukum, doktrin, asas-asas hukum, dan pendapat hukun dalam literatur, jurnal, hasil penelitian, dokumen, surat kabar, internet, dan majalah ilmiah.

### **3. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini akan dilakukan dengan dua langkah yaitu:

- a. Studi kepustakaan, yaitu dengan cara membaca, mempelajari dan memahami literatur-literatur dan hasil penelitian yang berkaitan dengan “Penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) nomor 4 tahun 2011 dalam tindak pidana korupsi.”
- b. Wawancara, yaitu mengadakan tanya jawab secara langsung kepada narasumber dengan menggunakan pedoman wawancara

#### **4. Narasumber**

Bapak Samsul Hadi selaku Hakim di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta

#### **5. Metode Analisis Data**

Analisis data dilakukan terhadap:

- a) Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, kemudian dianalisis sesuai dengan 5 (lima) tugas ilmu hukum normatif atau dogmatik hukum, yakni mendeskripsikan hukum positif, mensistematisasikan hukum positif, menilai, menganalisis dan menginterpretasikan hukum positif.
- b) Sedangkan bahan hukum sekunder yang berupa fakta hukum, doktrin, asas-asas hukum, dan pendapat hukum dalam literatur, jurnal, hasil penelitian, dokumen, surat kabar, internet, dan majalah ilmiah

dianalisis untuk menemukan persamaan dan perbedaanya. Kemudian menganalisisnya secara kualitatif dengan menggunakan metode berpikir deduktif. Metode berpikir deduktif adalah cara berpikir yang berangkat dari peraturan perundang-undangan kemudian dibawah kemasalah yang sebenarnya.

Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder diperbandingkan, dan dicari ada tidaknya kesenjangan antara data primer dan data sekunder.

## **6. Proses Berpikir**

Dalam menarik kesimpulan, proses berpikir atau prosedur bernalar digunakan secara deduktif. Proses berpikir di penelitian primer yaitu proses berpikir deduktif, proses berfikir dari umum ke khusus. Dalam hal ini yang umum berupa peraturan Perundang-undangan mengenai penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) nomor 4 tahun 2011 yang meringankan saksi pelaku (*Justice Collaborator*) dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan khusus terhadap hasil penelitian mengenai tujuan penelitian untuk mengetahui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) nomor 4 tahun 2011 dalam tindak pidana korupsi.

## **H. Sistematika Penulisan Hukum**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan

penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, tinjauan pustaka, batasan konsep, metode penelitian dan sistematika skripsi.

## **BAB II PEMBAHASAN**

Bab ini berisi mengenai tinjauan umum mengenai Penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) nomor 4 tahun 2011 dalam tindak pidana korupsi, tinjauan umum tentang meringankan saksi pelaku (*Justice Collaborator*) dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, yang menguraikan tentang pengaturan *Justice collaborator* dalam hukum positif di Indonesia, pengaturan *Justice collaborator* dalam SEMA No. 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi saksi pelapor (*Whistle blower*) dan saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice collaborator*) dalam tindak pidana tertentu, pengertian *Justice collaborator*, hal-hal yang dapat mempengaruhi pertimbangan hakim mengenai *Justice Collaborator*, Kemudian membahas mengenai mekanisme upaya perlindungan hukum terhadap *Justice Collaborator*, hambatan yang timbul dalam penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistkeblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice collaborator*) di dalam Tindak Pidana Tertentu yang meringankan saksi pelaku (*Justice Collaborator*) dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. dan cara untuk mengatasi hambatan tersebut dalam penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) nomor 4 tahun 2011 yang meringankan saksi pelaku (*Justice Collaborator*) dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

## **BAB III PENUTUP**

Bab ini merupakan bab terakhir dari penulisan hukum yang berisi mengenai kesimpulan yang diambil dari penyusunan pokok bahasan yang diangkat untuk dapat menjawab identifikasi masalah dan membuat saran

terhadap masalah yang berkaitan dengan Penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 yang Meringankan Saksi Pelaku (*Justice Collaborator*) dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.